

POLA KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI JAWA BARAT

Household Food Consumption Patterns in West Java Province

Astari Miranti*, Yusman Syaukat, Harianto

*Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Gedung FEM Lt. 3, Jl. Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mail: astarimiranti@gmail.com

Diterima: 15 Februari 2016

Direvisi: 11 Maret 2016

Disetujui terbit: 26 April 2016

ABSTRACT

Food issue, including food security issue, is a part of agriculture concern. One way to overcome the problems of food is to diversify household food consumption. How household decide their food consumption is depending on their food share allocation pattern and food demand. Objectives of this research are (1) to analyze household food share allocation pattern in West Java Province, and (2) to analyze household food demand in West Java Province. This research used secondary data, i.e. Susenas (National Socio-Economic Survey) in 2015. The study found that household income is still low. Most urban households consume cooked food and beverages, while most rural households consume grains. Changes in income and food prices will not significantly affect the household's demand for food because almost of all variables are basic commodities (inelastic goods) for households in West Java Province.

Keywords: *food consumption, food diversification, LA/AIDS*

ABSTRAK

Permasalahan pangan, termasuk isu ketahanan pangan, merupakan bagian dari permasalahan pertanian. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pangan adalah dengan melakukan diversifikasi pangan. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pola alokasi pengeluaran pangan dan permintaan pangan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pola alokasi pengeluaran pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat dan (2) menganalisis elastisitas harga dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data Susenas tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat masih rendah. Rumah tangga di perkotaan paling banyak mengeluarkan konsumsi pangan untuk kelompok makanan dan minuman jadi, sedangkan rumah tangga perdesaan pada kelompok padi-padian. Perubahan pendapatan dan harga pangan tidak memengaruhi permintaan pangan secara signifikan karena hampir semua variabel yang digunakan merupakan barang pokok (barang inelastis) bagi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: *konsumsi pangan, diversifikasi pangan, LA/AIDS*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Data BKP (2015) menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang tidak tahan pangan. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yang masuk kategori rawan pangan dan sangat rawan pangan adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu masing-masing mencapai 15.554.636 dan 7.919.360 orang penduduk. Wiranthi et al. (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi urutan ke-3 yang memiliki jumlah rumah tangga terbanyak dengan *per adult-equivalent calorie intake* di bawah rata-rata referensi dewasa, setelah Jawa

Timur dan Jawa Tengah. *Per adult-equivalent calorie intake* merupakan salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang memiliki nilai *per adult-equivalent calorie intake* di bawah rata-rata referensi dewasa di Jawa Barat mencapai 10% dari jumlah total rumah tangga.

Diversifikasi pangan merupakan salah satu indikator kuantitatif yang dapat menggambarkan ketahanan pangan rumah tangga (Alexandri et al. 2015). Salah satu pilar penting dari ketahanan pangan adalah akses/keterjangkauan terhadap pangan. Ruel (2003) mendefinisikan diversitas pangan sebagai jumlah pangan atau kelompok pangan yang berbeda yang dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hidup dengan gizi seimbang, rumah tangga harus

mengonsumsi beragam pangan dan tidak boleh bertumpu hanya pada sumber karbohidrat saja.

Rachman dan Ariani (2008) menemukan bahwa rata-rata kualitas konsumsi pangan di Indonesia masih rendah dan kurang terdiversifikasi, masih didominasi pangan sumber karbohidrat, terutama dari padi-padian. Di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002 pengeluaran pangan untuk kelompok padi-padian mencapai 19,10% di perkotaan dan 29,00% di perdesaan. Hal ini menunjukkan betapa besar ketergantungan rumah tangga pada konsumsi padi-padian (Ariani dan Purwantini 2006). Padahal, manusia membutuhkan lebih dari 40 jenis zat gizi untuk dapat hidup aktif dan sehat dan tidak ada jenis pangan yang dapat memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut. Defisiensi mikronutrien memberikan beban yang besar pada penderitanya dan masyarakat, yaitu berupa biaya kesehatan dan dampak negatif pada sumber daya manusia dan mengurangi produktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan defisiensi mikronutrien mengganggu pertumbuhan fisik dan belajar, membatasi produktivitas, dan akhirnya melanggengkan kemiskinan di suatu siklus yang berkelanjutan. Adapun cara yang paling efektif untuk mencegah kelaparan tersembunyi adalah dengan meningkatkan diversifikasi pangan (IFPRI 2014). Oleh sebab itu, diversifikasi konsumsi pangan merupakan hal penting untuk dilakukan.

Penelitian Thiele dan Weiss (2003) serta Ogundari (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola konsumsi pangan antara rumah tangga di perkotaan dan perdesaan, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat diversifikasi pangan rumah tangga. Perbedaan ini juga disertai dengan adanya perbedaan tingkat pendapatan dan harga pangan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga Provinsi Jawa Barat, melalui pola alokasi pengeluaran pangan dan pola perubahan permintaan pangan. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah (1). menganalisis pola alokasi pengeluaran pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat dan (2) menganalisis perubahan permintaan pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat yang terjadi akibat perubahan pendapatan dan harga pangan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

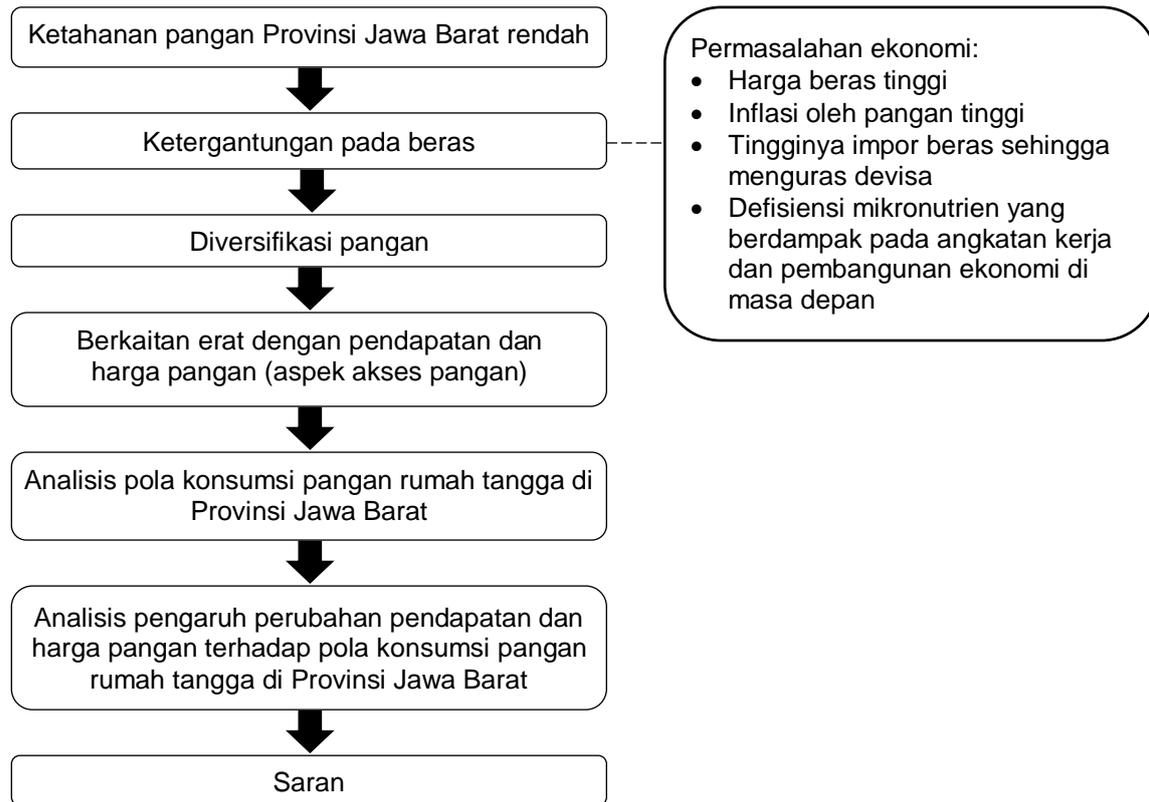
Dalam indeks ketahanan pangan global pada tahun 2015 Indonesia merupakan ranking ke-74

dari 109 negara, dengan skor 46,7/100 (EIU 2015). Skor tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih harus memperbaiki kondisi pangannya agar masyarakat makin tahan pangan. Salah satu indikasi ketahanan pangan rumah tangga adalah diversifikasi pangan, yang dapat dilihat melalui pola konsumsi pangan rumah tangga. Rendahnya diversifikasi pangan rumah tangga akan menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi, baik bagi individu anggota rumah tangga, masyarakat, dan juga negara.

Rendahnya diversifikasi pangan rumah tangga ditandai dengan tingginya ketergantungan rumah tangga pada beras. Hal tersebut mengakibatkan makin tingginya harga beras akibat tingginya permintaan beras disertai dengan penawaran beras yang fluktuatif. Peningkatan harga beras ini menyebabkan inflasi bulanan menjadi tinggi dan fluktuatif. Keadaan ini mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah cenderung mengatasi permasalahan harga beras dan inflasi dengan melakukan impor beras dalam volume besar yang berdampak pada terkurasnya cadangan devisa.

Selain itu, konsumsi beras yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi mikronutrien pada anggota rumah tangga. Hal ini memengaruhi kemampuan belajar dan bekerja penderitanya dan meningkatkan biaya kesehatan masyarakat, sehingga memengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam negeri, melanggengkan siklus kemiskinan, serta menghambat pembangunan ekonomi di masa depan (IFPRI 2014).

Salah satu yang memengaruhi diversifikasi pangan rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga (Thiele dan Weiss 2003; Ogundari 2013; Taruvinga et al. 2013). Makin tinggi pendapatan rumah tangga, makin terdiversifikasi pangan yang dikonsumsi rumah tangga tersebut. Sebaliknya, rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah hanya akan mengonsumsi produk pangan tertentu saja, terutama komoditas beras. Selain itu, faktor harga pangan memengaruhi permintaan rumah tangga terhadap jenis pangan tertentu, yang kemudian akan memengaruhi permintaan efektif/konsumsi pangan rumah tangga (Torlesse et al. 2003; Matz et al. 2015). Tinggi atau rendahnya tingkat diversifikasi pangan rumah tangga ditunjukkan oleh pola konsumsinya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi rumah tangga dan perubahannya jika terjadi perubahan pendapatan dan harga pangan. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka operasional penelitian pola konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *cross section*. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran tahun 2015. Data ini mencakup 22.340 rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Susenas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu total pengeluaran rumah tangga sebulan, total pengeluaran pangan rumah tangga, kuantitas dan total pengeluaran komoditas pangan yang diteliti, jumlah anggota rumah tangga, dan tipe daerah tinggal rumah tangga. Tidak semua rumah tangga mengonsumsi jenis pangan yang diteliti sehingga data yang digunakan dibersihkan (*cleaning data*) dan khusus data harga pangan *missing value* (data bernilai 0) diganti dengan nilai rata-ratanya.

Analisis Data

Pola alokasi pengeluaran rumah tangga dianalisis secara deskriptif. Adapun perubahan permintaan pangan dianalisis menggunakan nilai

elastisitas harga dan elastisitas pengeluarannya. Nilai elastisitas harga dan elastisitas pengeluaran rumah tangga didapat dengan menggunakan model linier *Almost Ideal Demand System* (LA/AIDS) dan diestimasi dengan metode *Seemingly Unrelated Regression* (SUR).

Fungsi permintaan AIDS dalam bentuk pangsa pengeluaran pangan (Deaton dan Muellbauer 1980), yaitu

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \log p_j + \beta_i \log \left\{ \frac{x}{P} \right\} \dots\dots\dots (1)$$

di mana:

- w_i = pangsa pengeluaran barang i
- p_j = harga barang j
- x = total pengeluaran pangan dari komoditas yang diteliti
- P = indeks harga
- $\alpha_i, \beta_i, \gamma_{ij}$ = parameter intersep, total pengeluaran, dan harga agregat
- EXP = pendapatan (pengeluaran) total rumah tangga j
- ART_j = jumlah anggota rumah tangga j
- D_wil_j = *dummy* tipe wilayah (0 = perdesaan, 1 = perkotaan)

Berdasarkan persamaan 1 maka dihasilkan persamaan-persamaan operasional sebagai berikut:

$$w_{BR} = \alpha_{BR} + \gamma_{11} \log p_{BR} + \gamma_{12} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{111} \log p_{RK} + \beta_{BR} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{BR} \log ART_j + \mu_{BR} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (2)$$

$$w_{TR} = \alpha_{TR} + \gamma_{21} \log p_{BR} + \gamma_{22} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{211} \log p_{RK} + \beta_{TR} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{TR} \log ART_j + \mu_{TR} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (3)$$

$$w_{IA} = \alpha_{IA} + \gamma_{31} \log p_{BR} + \gamma_{32} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{311} \log p_{RK} + \beta_{IA} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{IA} \log ART_j + \mu_{IA} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (4)$$

$$w_{SP} = \alpha_{SP} + \gamma_{41} \log p_{BR} + \gamma_{42} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{411} \log p_{RK} + \beta_{SP} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{SP} \log ART_j + \mu_{SP} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (5)$$

$$w_{AY} = \alpha_{AY} + \gamma_{51} \log p_{BR} + \gamma_{52} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{511} \log p_{RK} + \beta_{AY} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{AY} \log ART_j + \mu_{AY} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (6)$$

$$w_{TA} = \alpha_{TA} + \gamma_{61} \log p_{BR} + \gamma_{62} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{611} \log p_{RK} + \beta_{TA} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{TA} \log ART_j + \mu_{TA} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (7)$$

$$w_{SO} = \alpha_{SO} + \gamma_{71} \log p_{BR} + \gamma_{72} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{711} \log p_{RK} + \beta_{SO} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{SO} \log ART_j + \mu_{SO} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (8)$$

$$w_{JR} = \alpha_{JR} + \gamma_{81} \log p_{BR} + \gamma_{82} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{811} \log p_{RK} + \beta_{JR} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{JR} \log ART_j + \mu_{JR} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (9)$$

$$w_{MI} = \alpha_{MI} + \gamma_{91} \log p_{BR} + \gamma_{92} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{911} \log p_{RK} + \beta_{MI} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{MI} \log ART_j + \mu_{MI} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (10)$$

$$w_{RK} = \alpha_{RK} + \gamma_{101} \log p_{BR} + \gamma_{102} \log p_{TR} + \dots + \gamma_{1011} \log p_{RK} + \beta_{RK} \log \left\{ \frac{x}{p} \right\} + \theta_{RK} \log ART_j + \mu_{RK} \log D_Wil_j \dots\dots\dots (11)$$

Indeks harga *P* didefinisikan sebagai berikut:

$$\log P = \sum_i w_i \log p_i \dots\dots\dots(12)$$

Adapun pembatasan yang diberikan pada parameter persamaan AIDS (Persamaan 1), yaitu

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1; \sum_{i=1}^n \gamma_{ij} = 0; \sum_{i=1}^n \beta_i = 0$$

$$\sum_{j=1}^n \gamma_{ji} = 0$$

dan

$$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$$

Jika pembatasan tersebut diberlakukan, maka persamaan (1) akan menggambarkan fungsi sistem permintaan yang menambah hingga total pengeluaran ($\sum w_i = 1$) homogen derajat nol pada harga dan total belanja diambil bersama-sama, dan yang memenuhi simetri Slutsky.

Adapun rumus perhitungan elastisitas dengan menggunakan parameter hasil estimasi AIDS (Chalfant 1987, dalam Sitepu dan Sinaga 2006):

Elastisitas harga : $e_{ii} = \frac{\gamma_{ii} - \beta_i w_i}{w_i} - 1 \dots (13)$

Elastisitas silang : $e_{ij} = \frac{\gamma_{ij} - \beta_i w_j}{w_i}, i \neq j \dots (14)$

Elastisitas pendapatan : $\eta_i = 1 + \frac{\beta_i}{w_i} \dots\dots\dots (15)$

Nilai hasil persamaan (15) adalah elastisitas permintaan masing-masing komoditas pangan terhadap total pengeluaran makanan tertentu yang diteliti, bukan terhadap total pengeluaran (pendapatan) rumah tangga. Besaran elastisitas permintaan masing-masing komoditas pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga diperoleh dengan mengalikan nilai elastisitas persamaan (15) dengan nilai elastisitas total pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga (Asikin et al. 2009). Persamaan elastisitas total pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga, yaitu

$$\ln X = a + b \ln EXP + u_i \dots\dots\dots (16)$$

$$e_p = \frac{d \ln X}{d \ln EXP} = b \dots\dots\dots (17)$$

Persamaan elastisitas permintaan komoditas pangan tertentu terhadap total pengeluaran (Asikin et al. 2009), yaitu

$$e_{ii} = \eta_i \cdot e_p \dots\dots\dots (18)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat

Rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat secara umum pada tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata nasional, yaitu sebesar Rp703.561 dan Rp776.032. Namun, jika dibedakan berdasarkan tipe daerahnya diketahui bahwa rata-rata pendapatan per bulan rumah

tangga perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013 dan 2014 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga perkotaan dan perdesaan nasional (BPS 2016).

Data Susenas Provinsi Jawa Barat tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dan pangsa pengeluaran pangan yang cukup besar antara rumah tangga di perkotaan dan perdesaan. Rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga di perkotaan sebesar Rp956.607 lebih tinggi daripada rata-rata rumah tangga di perdesaan, yaitu sebesar Rp690.251 (Tabel 1).

Rata-rata pangsa pengeluaran pangan rumah tangga sebulan di perkotaan sebesar 53,41%, lebih rendah daripada rata-rata rumah tangga di perdesaan, yaitu sebesar 61,82% (Tabel 2). Makin tinggi pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga, makin rendah alokasi pengeluaran rumah tangga untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (listrik, air, bahan bakar, telekomunikasi), barang kebutuhan sehari-hari nonpangan, pengobatan (kesehatan), pendidikan, transportasi, pakaian, pajak, asuransi, dan kebutuhan rumah tangga nonpangan lainnya. Bahkan, dengan makin tingginya pangsa pengeluaran pangan akan menyebabkan rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan nonpangan—kebutuhan primernya sekalipun, seperti pendidikan dan kesehatan.

Rata-rata pangsa pengeluaran pangan secara umum dan di perkotaan mengalami peningkatan dengan laju rata-rata 6,32% per tahun, yang berarti porsi pengeluaran untuk pangan rumah tangga makin meningkat setiap tahunnya. Meski demikian, rata-rata pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di perkotaan Provinsi Jawa Barat masih di bawah 60,00% sehingga tidak termasuk rumah tangga yang rentan pangan.

Berbeda dengan rumah tangga di perkotaan, rumah tangga di perdesaan Provinsi Jawa Barat memiliki laju penurunan pangsa pengeluaran pangan rata-rata sebesar 0,14% per tahun, namun nilai rata-rata pangsa pengeluaran pangannya lebih besar daripada 60,00%

sehingga secara umum rumah tangga di perdesaan termasuk ke dalam rumah tangga yang rentan pangan. Selain itu, rata-rata pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pangsa pengeluaran pangan rumah tangga nasional. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Provinsi Jawa Barat lebih rentan pangan dibandingkan rata-rata rumah tangga nasional. Fakta ini mengimplikasikan dibutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar rumah tangga di Provinsi Jawa Barat menjadi lebih sejahtera dan tidak terlalu tertinggal / timpang dengan provinsi lainnya.

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan pendapatan per kapita per bulan namun pada rumah tangga di Provinsi Jawa Barat terjadi kenaikan pangsa pengeluaran pangan. Ini tidak sesuai dengan teori Hukum Engel. Hal ini terjadi karena kenaikan harga atau inflasi akibat dirubahnya skema subsidi BBM di awal tahun 2015. Perubahan skema subsidi BBM berupa skema *fixed subsidy* mengakibatkan terjadinya peningkatan harga secara signifikan dan temporer sehingga memengaruhi pendapatan efektif rumah tangga dan menyebabkan meningkatnya pangsa pengeluaran pangan rumah tangga.

Berdasarkan golongan pendapatan per kapita sebulan, pada tahun 2015 diketahui rumah tangga di perkotaan dengan golongan pendapatan di bawah Rp500.000 dan di perdesaan dengan golongan pendapatan di bawah Rp750.000 memiliki pangsa pengeluaran pangan di atas 60,00% (Tabel 3). Ini menunjukkan bahwa golongan pendapatan ini rentan pangan jika harga pangan meningkat. Hukum Engel menyatakan bahwa makin kaya suatu rumah tangga, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga tersebut akan makin turun. Berdasarkan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok G-1 sampai G4 di perkotaan dan kelompok G-1 sampai G-5 di perdesaan merupakan kelompok rumah tangga yang rentan pangan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa di perkotaan golongan pendapatan G-1 sampai G-4 dan di perdesaan golongan G-1 sampai G-5 merupakan kelompok

Tabel 1. Rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2013–2015 (Rupiah)

	2013 ^a	2014 ^a	2015 ^b
Perkotaan	861.629	911.736	956.607
Perdesaan	469.119	560.782	690.251
Perkotaan + perdesaan	726.828	793.816	860.258

Sumber: ^aBPS (2016a), ^bBPS (2016b), diolah

Tabel 2. Rata-rata pangsa pengeluaran pangan rumah tangga sebulan di Provinsi Jawa Barat, 2013–2015 (%)

Wilayah	Jawa Barat			Indonesia	
	2013 ^a	2014 ^a	2015 ^b	2013 ^a	2014 ^a
Perkotaan	48,02	44,59	53,41	45,86	44,93
Perdesaan	62,20	58,53	61,82	59,18	58,81
Perkotaan + perdesaan	51,17	47,90	56,45	50,66	50,04

Sumber: ^aBPS (2016a), ^bBPS (2016b), diolah

Tabel 3. Rata-rata pangsa pengeluaran pangan sebulan dan energi harian rumah tangga berdasarkan golongan pendapatan per kapita sebulan di Provinsi Jawa Barat, 2015

Golongan pendapatan per kapita sebulan (Rupiah)	Pangsa pengeluaran pangan (%)		Energi (kkal)		Jumlah RT	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
100.000–149.999 (G-1)	64,51	68,26	1.256	1.156	15	5
150.000–199.999 (G-2)	65,11	66,51	1.379	1.324	80	70
200.000–299.999 (G-3)	62,09	65,98	1.517	1.561	849	680
300.000–499.999 (G-4)	62,13	67,49	1.811	1.894	3.176	2.511
500.000–749.999 (G-5)	56,97	62,23	2.055	2.244	3.177	2.498
750.000–999.999 (G-6)	53,73	59,37	2.220	2.497	2.297	977
1.000.000 dan lebih (G-7)	43,06	49,86	2.434	2.773	4.665	1.340

Sumber: BPS (2016b), diolah

yang paling pantas untuk mendapatkan program bantuan pangan jika terjadi kenaikan harga pangan yang besar.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa golongan yang merupakan pembatas adalah golongan pendapatan Rp300.000–Rp499.999 (G-4). Rumah tangga G-4 memiliki pangsa pengeluaran pangan yang lebih tinggi daripada G-3, namun rata-rata kalori harian rumah tangga ini jauh lebih tinggi daripada rumah tangga G-3. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola konsumsi pangan yang signifikan sehingga terjadi perbaikan asupan kalori harian rumah tangga. Di sisi lain, meskipun rumah tangga di perkotaan sudah memiliki pangsa pengeluaran pangan di bawah 60% pada G-5 dan rumah tangga di perdesaan belum namun pada tingkat G-5 tersebut justru rumah tangga di perdesaan yang sudah memenuhi kalori di atas 2.150 kkal. Hasil yang berbeda dari kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga di perkotaan dan perdesaan memiliki pola pangan yang berbeda, yakni rumah tangga di perkotaan dengan pangsa pengeluaran pangan yang lebih rendah memiliki selisih yang kecil untuk mencapai pemenuhan kebutuhan kalori 2.150 kkal.

Tabel 4 memperlihatkan perbedaan pola pangan rumah tangga perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Barat dengan asumsi harga yang dihadapi oleh semua rumah tangga di Provinsi Jawa Barat sama per kelompok pangannya. Perbedaan terbesar pola pangan di kedua wilayah tersebut ada pada kelompok padi-padian serta makanan dan minuman jadi.

Rumah tangga di perdesaan mengonsumsi lebih banyak pangan padi-padian sehingga menghabiskan rata-rata 24,57 dari pengeluaran pangannya, lebih besar 7,01% dibandingkan rumah tangga di perkotaan. Nilai tersebut menunjukkan penurunan dari keadaan tahun 2002, yaitu pengeluaran pangan untuk kelompok padi-padian mencapai 19,10% di perkotaan dan 29,00% di perdesaan (Ariani dan Purwantini 2006). Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian Purwaningsih et al. (2010), ketika pangsa pengeluaran untuk padi-padian di rumah tangga perdesaan lebih tinggi daripada rumah tangga perkotaan. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga perkotaan pada kelompok umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, dan buah-buahan diakibatkan harga beras di perkotaan yang lebih rendah. Rata-rata harga beras di perkotaan sebesar Rp9.366, sedangkan rata-rata harga di perdesaan sebesar Rp9.661. Penelitian Torlesse et al. (2003) dan Miranti

Tabel 4. Rata-rata pangsa pengeluaran pangan rumah tangga berdasarkan kelompok pangan di Provinsi Jawa Barat, 2015

Kelompok	Pangsa rata-rata (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Selisih
Padi-padian	17,56	24,57	-7,01
Umbi-umbian	1,89	1,73	0,16
Ikan	6,19	6,13	0,06
Daging	6,84	6,41	0,43
Telur dan susu	6,22	5,00	1,22
Sayur-sayuran	6,27	6,46	-0,19
Kacang-kacangan	3,05	3,22	-0,17
Buah-buahan	5,44	4,74	0,70
Minyak	3,01	3,25	-0,24
Konsumsi lainnya	3,12	3,24	-0,12
Tembakau dan sirih	17,88	19,29	-1,41
Bahan minuman	3,51	3,97	-0,46
Bumbu-bumbuan	2,17	2,33	-0,16
Makanan dan minuman jadi	30,35	23,23	7,12

Sumber: BPS (2016b), diolah

(2016) menunjukkan bahwa penurunan harga beras akan meningkatkan konsumsi pangan komoditas pangan lain sehingga pada rumah tangga perkotaan Jawa Barat terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, dan buah-buahan.

Selain itu, rumah tangga di perkotaan mengonsumsi lebih banyak, baik kuantitas maupun jenis, makanan dan minuman jadi sehingga menghabiskan rata-rata 30,35% dari pengeluaran pangannya. Jumlah tersebut lebih besar 7,12% dibandingkan pengeluaran pangan rumah tangga perdesaan untuk makanan dan minuman jadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Purwaningsih et al. (2010) yang menemukan bahwa pada semua tingkat ketahanan pangan memiliki alokasi pengeluaran untuk kelompok makanan dan minuman jadi yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan gaya hidup dan kesibukan masyarakat perkotaan dan perdesaan. Masyarakat perkotaan umumnya memiliki kesibukan di luar rumah dan hampir sepanjang hari mengharuskan mereka untuk mengonsumsi makanan dan minuman jadi. Selain itu, gaya hidup urban yang senang berkumpul dan makan di luar rumah turut meningkatkan proporsi pengeluaran makanan dan minuman jadi serta meningkatkan industri makanan dan minuman jadi.

Selain kedua jenis kelompok pangan tersebut, kelompok pangan lain yang memiliki

pangsa besar adalah kelompok tembakau dan sirih. Hal ini masih sama dengan keadaan pada tahun 2007 (Purwantini dan Ariani 2008). Tidak terdapat perbedaan yang jauh antara rumah tangga perkotaan dan perdesaan dalam mengonsumsi tembakau dan sirih, masing-masing rumah tangga rata-rata mengeluarkan 17,88% dan 19,29% pengeluarannya untuk mengonsumsi produk tembakau dan sirih. Rumah tangga yang mengonsumsi produk kelompok tembakau dan sirih mencapai 66,47% dari jumlah rumah tangga perkotaan dan 73,87% dari jumlah rumah tangga perdesaan. Produk kelompok tersebut yang paling banyak dikonsumsi adalah rokok (berbagai tipe rokok), meskipun telah ditetapkan sebagai produk yang berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang yang beranggapan bahwa rokok merupakan hal yang penting karena rokok merupakan media interaksi sosial dengan teman atau saudara (Purwantini dan Ariani 2008).

Banyaknya jumlah rumah tangga yang mengonsumsi produk kelompok tembakau dan sirih dan besarnya pangsa yang dikeluarkan untuk mengonsumsinya menunjukkan rendahnya kesadaran rumah tangga di Provinsi Jawa Barat untuk menjaga kesehatannya. Hal ini akan berakibat pada buruknya kesehatan individu, turunnya kapasitas kerja, dan produktivitas angkatan kerja sehingga dapat mengakibatkan terhambat atau turunnya pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian Kosen (2008) dengan menggunakan data tahun 2004–2005 menunjukkan bahwa konsumsi rokok dapat menghilangkan lebih dari 10 juta tahun hidup produktif dan mengakibatkan kerugian makroekonomi hingga 44 triliun rupiah serta menimbulkan biaya kesehatan mencapai 2 triliun rupiah. Nilai kerugian ekonomi akibat rokok tersebut akan menjadi jauh lebih besar di masa depan.

Perbedaan pola tersebut juga didasari pada perubahan pola konsumsi antargolongan pendapatan per kapita dan antarwilayah. Gambar 2 menggambarkan terjadinya penurunan konsumsi kelompok padi-padian seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita rumah tangga.

Rumah tangga G-1 baik di perkotaan maupun di perdesaan menghabiskan hampir 50% pengeluaran pangannya untuk kelompok padi-padian, sedangkan rumah tangga G-7 bahkan tidak mencapai 20% pengeluaran pangannya untuk kelompok padi-padian. Rata-rata laju penurunan konsumsi kelompok padi-padian di rumah tangga perkotaan mencapai 19,57%, sedangkan di rumah tangga perdesaan sebesar 15,02%.

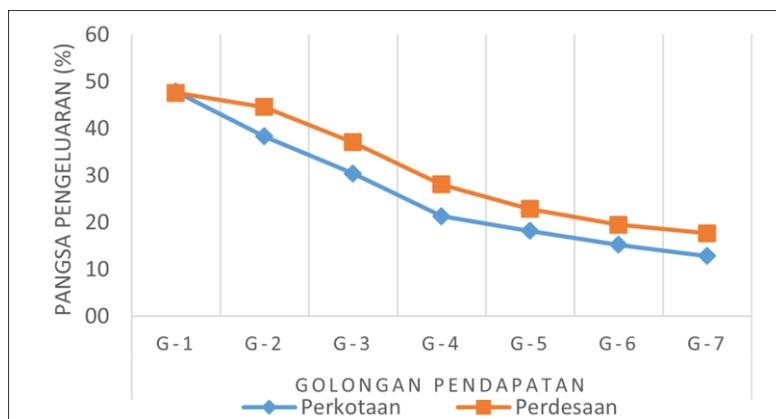
Peningkatan pendapatan rumah tangga meningkatkan konsumsi kelompok pangan selain padi-padian. Hal tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah agar kebutuhan pangan rumah tangga dapat dipenuhi. Komoditas pangan yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah komoditas daging dan buah-buahan sebab peningkatan konsumsi komoditas tersebut paling signifikan seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Berbeda dengan kelompok padi-padian, konsumsi produk kelompok daging makin

meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita (Gambar 3). Hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hukum Bennet. Rata-rata laju peningkatan konsumsi di rumah tangga perkotaan mencapai 11,30%, sedangkan rumah tangga perdesaan hanya sebesar 0,95%. Terdapat perbedaan yang mencolok antara rumah tangga di perkotaan dan perdesaan pada G-1. Rumah tangga G-1 di perkotaan masih mampu mengonsumsi produk kelompok daging dengan rata-rata pangsa pengeluaran sebesar 5,01%, namun rumah tangga G-1 di perdesaan sama sekali tidak mampu mengonsumsi produk kelompok daging (rata-rata pangsa pengeluaran 0%).

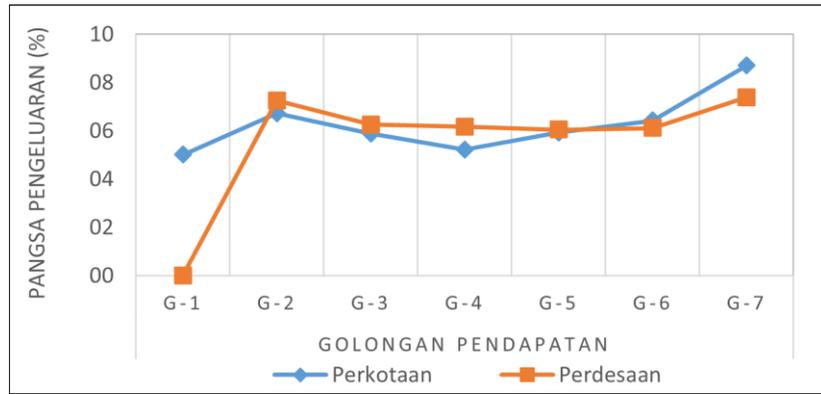
Serupa dengan kelompok daging, konsumsi kelompok buah-buahan juga meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita (Gambar 4). Meski demikian, rata-rata laju peningkatan konsumsi buah-buahan tidak sebesar rata-rata laju peningkatan konsumsi daging. Rata-rata laju peningkatan pangsa pengeluaran buah-buahan di rumah tangga perkotaan sebesar 6,49% dan di rumah tangga perdesaan sebesar 7,33%.

Berdasarkan Gambar 2, 3, dan 4 diketahui bahwa hukum Bennet berlaku pada rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Hukum ini menyatakan bahwa makin kaya suatu masyarakat, mereka akan mengubah pola konsumsi mereka, yang awalnya didominasi oleh tanaman berpati sederhana berubah menjadi lebih bervariasi, yaitu mengonsumsi sayuran, buah, produk susu, dan terutama daging. Makin tinggi pendapatan per kapita rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, baik di perkotaan maupun perdesaan, makin



Sumber: BPS (2016b), diolah

Gambar 2. Pangsa pengeluaran rata-rata konsumsi produk kelompok padi-padian rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2015



Sumber: BPS (2016b), diolah

Gambar 3. Pangsa pengeluaran rata-rata konsumsi produk kelompok daging rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2015

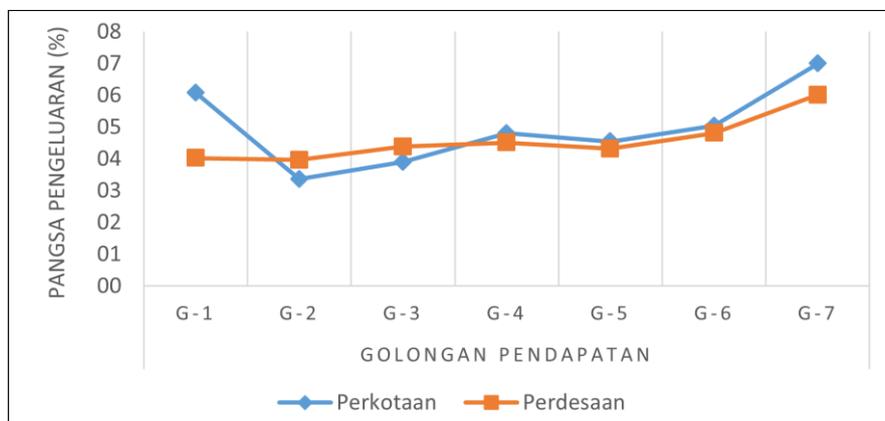
mengalami penurunan pangsa pengeluaran produk padi-padian, terutama beras, disertai dengan peningkatan pangsa pengeluaran pangan untuk mengonsumsi produk buah-buahan dan daging. Perubahan ini terjadi karena peningkatan pendapatan per kapita rumah tangga tidak disertai dengan peningkatan kuantitas produk padi-padian yang dikonsumsi, namun disertai dengan peningkatan jenis pangan yang dikonsumsi, yaitu pangan dari kelompok daging dan buah-buahan. Meski demikian, penemuan ini tidak dapat digunakan untuk mengategorikan karakter komoditas-komoditas tersebut (barang inferior, normal, atau mewah), sehingga tidak bisa ditentukan apakah beras termasuk barang inferior atau daging dan buah-buahan barang mewah.

Peningkatan konsumsi seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita juga terjadi pada kelompok tembakau dan sirih. Bahkan, rata-rata laju peningkatan konsumsi kelompok ini lebih tinggi daripada rata-rata laju kelompok lainnya. Rata-rata laju peningkatan konsumsi produk kelompok tembakau dan sirih pada

rumah tangga perkotaan sebesar 14,34% dan di perdesaan sebesar 15,04%. Meski demikian, terdapat kecenderungan penurunan pangsa pengeluaran untuk konsumsi kelompok ini pada rumah tangga G-7, baik di perkotaan maupun perdesaan (Gambar 5). Penurunan pangsa pengeluaran ini diakibatkan meningkatnya kesadaran akan bahaya rokok terhadap kesehatan sehingga rumah tangga mengurangi konsumsi rokoknya. Selain itu, Kosen (2008) dan Purwaningsih et al. (2010) menyebutkan bahwa berbagai studi empiris menunjukkan masyarakat miskin cenderung menggunakan tembakau (rokok) lebih banyak dibandingkan masyarakat kaya.

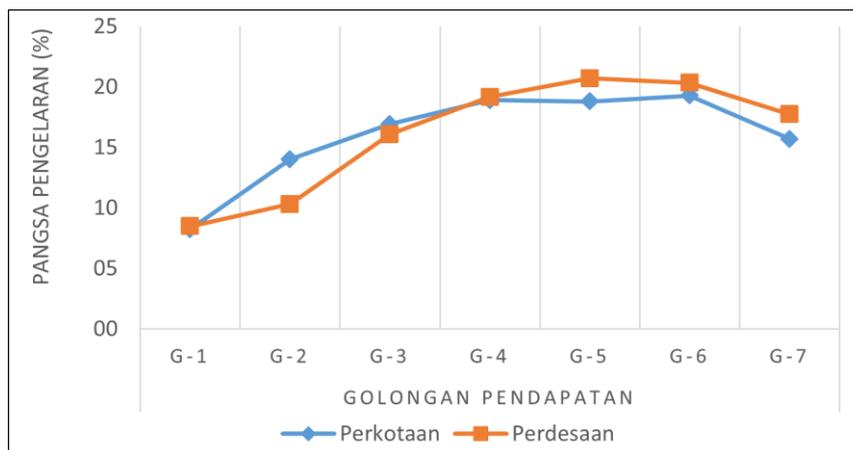
Elastisitas Pendapatan dan Elastisitas Harga Pangan di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa semua komoditas memiliki elastisitas harga sendiri (*own price elasticity*) yang bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kurva permintaan memiliki *downward sloping*.



Sumber: BPS (2016b), diolah

Gambar 4. Pangsa pengeluaran rata-rata konsumsi produk kelompok buah-buahan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2015



Sumber: BPS (2016b), diolah

Gambar 5. Pangsa pengeluaran rata-rata konsumsi produk kelompok tembakau dan sirih rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2015

Tabel 5 memperlihatkan hasil estimasi elastisitas dengan menggunakan model LA/AIDS. Sebagian besar komoditas pangan memiliki nilai elastisitas kurang dari -1 (bersifat inelastis), yaitu beras, ikan diawetkan, daging ayam ras, telur ayam ras, sayur sop/capcay, jeruk, mi instan, dan tahu. Di antara komoditas pangan tersebut yang paling inelastis adalah sayur sop/capcay sebab dengan peningkatan harga sendiri sebesar 10% hanya akan menurunkan permintaannya sebesar 5,96%. Jika komoditas pangan yang memiliki nilai elastisitas harga sendiri yang inelastis mengalami peningkatan harga, rumah tangga harus meningkatkan pengeluarannya untuk mengonsumsi komoditas tersebut akibat rendahnya respons rumah tangga pada perubahan harga tersebut. Mauludyani et al. (2008) menyatakan makin tinggi pendapatan maka permintaan beras cenderung makin kurang elastis terhadap harga beras. Nilai elastisitas beras sebesar -0,718 menunjukkan bahwa rumah tangga di Provinsi Jawa Barat belum memiliki pendapatan yang tinggi.

Adapun komoditas pangan yang memiliki elastisitas harga sendiri yang bersifat elastis adalah komoditas terigu, daging sapi, dan rokok kretek filter. Di antara ketiga komoditas pangan tersebut, komoditas daging sapi memiliki nilai elastisitas harga sendiri yang paling tinggi, yaitu sebesar -1,956. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika harga daging sapi meningkat sebesar 10% maka permintaan terhadap daging sapi akan menurun sebesar 19,56%.

Elastisitas harga silang memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu negatif dan positif. Variabel yang memiliki nilai elastisitas silang yang negatif menunjukkan bahwa hubungan antara dua komoditas tersebut adalah komplementer. Sebaliknya, nilai elastisitas silang

positif menunjukkan hubungan dua komoditas yang substitusi.

Elastisitas harga silang komoditas beras memiliki lebih banyak nilai negatif dibandingkan nilai positif, yang menunjukkan lebih banyak hubungan komplementer dengan komoditas pangan lain daripada hubungan substitusi. Beras berhubungan komplementer paling erat dengan komoditas ikan yang diawetkan. Nilai elastisitas harga silang beras terhadap ikan diawetkan sebesar -0,028, yang berarti kenaikan harga ikan yang diawetkan sebesar 10% hanya akan menurunkan permintaan terhadap beras sebesar 0,28%, sedangkan komoditas komplementer lainnya hanya akan menurunkan permintaan terhadap beras kurang dari 0,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan beras tidak responsif terhadap perubahan harga barang komplementernya. Hubungan komplementer komoditas beras dengan ikan yang diawetkan yang lebih erat daripada dengan komoditas lain didukung oleh penelitian Cahyaningsih (2008), Putranto dan Taofik (2014), dan Jayati et al. (2014) yang menyatakan bahwa kebutuhan pangan sumber protein hewani rumah tangga di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh ikan. Adapun komoditas yang berhubungan substitusi dengan beras adalah komoditas daging sapi dan tahu, namun hubungan tersebut bersifat inelastis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan harga daging sapi dan tahu sebesar 10% akan meningkatkan permintaan beras sebesar 0,89% dan 0,02%, yang dilakukan rumah tangga untuk tetap memenuhi kebutuhan energi hariannya.

Hubungan permintaan daging sapi dengan sesama anggota kelompok daging-dagingan, yaitu daging ayam ras, merupakan hubungan substitusi. Peningkatan harga daging ayam ras

Tabel 5. Nilai elastisitas sendiri dan elastisitas silang dari rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2015

Pangan	Harga										
	BR	TR	IA	SP	AY	TA	SO	JR	MI	RK	TH
BR	-0,718	-0,015	-0,028	0,089	-0,013	-0,013	-0,020	-0,025	-0,023	-0,001	0.002
TR	-0,364	-1,148	-0,004	0,395	0,306	0,021	-0,049	0,055	0,121	0,025	-0.031
IA	-0,448	-0,005	-0,940	0,076	0,316	-0,033	0,062	0,034	0,001	0,125	-0.039
SP	1,182	0,159	0,074	-1,956	0,227	0,112	0,066	0,056	0,356	-0,390	0.069
AY	-0,008	0,037	0,074	0,048	-0,785	0,015	-0,004	-0,026	-0,046	-0,010	0.022
TA	-0,091	0,001	-0,010	0,020	0,002	-0,762	0,001	0,000	-0,024	0,036	-0.016
SO	-0,351	-0,036	0,084	0,099	-0,024	0,018	-0,596	0,181	-0,065	0,050	-0.055
JR	-0,159	0,018	0,025	0,024	-0,062	0,018	0,083	-0,887	-0,031	0,291	0.042
MI	-0,206	0,024	-0,002	0,179	-0,117	-0,039	-0,026	-0,036	-0,619	-0,048	-0.042
RK	-0,731	-0,026	-0,024	-0,209	-0,245	-0,130	-0,033	0,003	-0,132	-1,016	-0.068
TH	0,023	-0,013	-0,023	0,039	0,057	-0,026	-0,029	0,043	-0,056	0,029	-0.791

Keterangan: BR = beras
 AY = daging ayam ras
 MI = mi instan
 TR = terigu
 TA = telur ayam ras
 RK = rokok kretek filter
 IA = ikan yang diawetkan
 SO = sayur sop/capcay
 TH = tahu
 SP = daging sapi
 JR = jeruk

Sumber: BPS (2016b), diolah

sebesar 10% akan meningkatkan permintaan terhadap daging sapi sebesar 2,27%. Sebaliknya, jika harga daging sapi meningkat sebesar 10% maka akan meningkatkan permintaan terhadap daging ayam ras sebesar 0,48%. Barang substitusi daging ayam ras yang memiliki nilai elastisitas paling tinggi adalah ikan yang diawetkan. Peningkatan harga ikan yang diawetkan sebesar 10% akan meningkatkan permintaan terhadap daging ayam ras sebesar 0,74%.

Komoditas sayur sop/capcay memiliki hubungan komplementer dengan komoditas beras. Peningkatan harga beras sebesar 10% akan menurunkan permintaan terhadap sayur sop/capcay sebesar 3,51%. Sebaliknya, hubungan sayur sop/capcay dengan daging sapi merupakan hubungan substitusi karena peningkatan harga daging sapi sebesar 10% akan meningkatkan permintaan terhadap sayur sop/capcay sebesar 0,99%.

Komoditas jeruk memiliki hubungan saling menyubstitusikan dengan rokok kretek filter. Peningkatan harga rokok kretek filter sebesar 10% akan meningkatkan permintaan terhadap jeruk sebesar 2,91%. Sebaliknya, jika harga jeruk meningkat sebesar 10% peningkatan permintaan terhadap rokok kretek filter hanya sebesar 0,03%. Hal ini diduga terjadi karena adanya perbedaan preferensi konsumsi antara rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya, yang ditunjukkan banyaknya studi empiris masyarakat miskin mengonsumsi lebih banyak rokok (Kosen 2008) dan konsumsi buah-buahan yang lebih tinggi pada rumah tangga kaya. Selain komoditas jeruk, nilai elastisitas silang

komoditas lainnya menunjukkan nilai positif, yang menunjukkan bahwa komoditas lainnya merupakan barang komplementer. Hal ini menunjukkan bahwa bagi rumah tangga pengonsumsi rokok kretek filter tidak ada komoditas lain yang dapat menyubstitusinya sehingga rokok kretek filter merupakan komoditas pangan yang sangat penting.

Diversifikasi pangan akan terjadi jika terdapat permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Ketika harga beras turun, akan terjadi peningkatan tingkat diversifikasi pangan. Hal ini dapat diestimasi bahwa penurunan harga beras sebesar 10% akan meningkatkan permintaan terhadap terigu sebesar 3,64%, ikan diawetkan sebesar 4,48%, daging ayam ras sebesar 0,08%, telur ayam ras sebesar 0,91%, sayur sop/capcay sebesar 3,51%, jeruk sebesar 1,59%, mi instan sebesar 2,06%, dan rokok kretek filter sebesar 7,31% (Tabel 5). Hal yang sama juga terjadi pada rumah tangga di Bangladesh, yaitu ketika harga beras turun, rumah tangga menjadi mampu untuk mengalokasikan pengeluarannya untuk pangan yang lebih beragam (Torlesse et al. 2003). Pengaruh penurunan harga beras terhadap permintaan komoditas pangan lain dan diversifikasi pangan jauh lebih besar daripada jika komoditas pangan lain diturunkan harganya.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa berdasarkan model LA/AIDS, selain komoditas rokok kretek filter, komoditas pangan yang lain merupakan barang pokok. Komoditas-komoditas yang termasuk barang pokok tersebut, yaitu beras, terigu, ikan yang diawetkan, daging sapi,

daging ayam ras, telur ayam ras, sayur sop/capcay, jeruk, mi instan, dan tahu. Adapun permintaan terhadap rokok kretek filter responsif terhadap perubahan pengeluaran rumah tangga.

Tabel 6. Nilai elastisitas pengeluaran dari rumah tangga di Provinsi Jawa Barat, 2015

Pangan	LA/AIDS
Beras	0,388
Terigu	0,341
Ikan diawetkan	0,429
Daging sapi	0,022
Daging ayam ras	0,345
Telur ayam ras	0,426
Sayur sop/capcay	0,351
Jeruk	0,323
Mi instan	0,472
Rokok kretek filter	1,321
Tahu	0,379

Sumber: BPS (2016), diolah

Komoditas daging sapi termasuk barang pokok dengan peningkatan permintaan hanya 0,22% jika pendapatan rumah tangga meningkat 10% tidak sesuai dengan hipotesis bahwa daging sapi merupakan barang mewah. Hal ini menunjukkan permintaan terhadap sapi tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor pendapatan rumah tangga, namun lebih dipengaruhi oleh faktor harga daging sapi itu sendiri dan faktor nonekonomi, seperti budaya atau selera. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Cahyaningsih (2008), Putranto dan Taofik (2014), dan Jayati et al. (2014) yang menyebutkan bahwa kebutuhan pangan sumber protein hewani rumah tangga di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh ikan sehingga ketika terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga hanya terjadi sedikit peningkatan permintaan terhadap daging sapi.

Berdasarkan model LA/AIDS, nilai elastisitas pendapatan rokok kretek filter sebesar 1,321 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 10% akan meningkatkan permintaan terhadap rokok kretek filter sebesar 13,21%. Elastisitas nilai elastisitas pendapatan rokok kretek filter dan tidak adanya barang substitusi merupakan hal yang tidak baik dan harus diantisipasi. Rokok merupakan barang yang menghasilkan dampak yang buruk jika dikonsumsi. Dampak buruk rokok pada kesehatan akan mengakibatkan turunya produktivitas tenaga kerja dan turunya ekspektasi hidup yang berdampak pada

terhambatnya atau turunnya pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat, bahkan pembangunan nasional.

Berdasarkan nilai elastisitasnya diketahui bahwa permintaan rokok bersifat elastis, baik terhadap harga sendiri maupun terhadap pengeluaran rumah tangga, sehingga kebijakan yang tepat untuk mengendalikan permintaan terhadap rokok adalah melalui kebijakan yang memengaruhi harga rokok dan pendapatan rumah tangga. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan cukai rokok atau kewajiban sejenis asuransi kesehatan dengan premi tinggi. Kebijakan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan harga rokok, namun hal tersebut hanya akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap beras, daging sapi, daging ayam ras, dan mi instan dalam jumlah yang sangat kecil.

Hasil perhitungan elastisitas dengan menggunakan model LA/AIDS menunjukkan bahwa nilai elastisitas harga sendiri suatu pangan lebih besar daripada nilai elastisitas pengeluaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan pangan rumah tangga lebih dipengaruhi oleh harga pangan daripada oleh pendapatan rumah tangga. Oleh sebab itu, kebijakan untuk mengendalikan permintaan pangan lebih baik dilakukan melalui pengendalian harga pangan dibandingkan melalui kebijakan yang memengaruhi pendapatan rumah tangga, misalkan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di perkotaan dan perdesaan masih tinggi dan pengeluaran pangan masih didominasi oleh pangan kelompok padi-padian. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat masih relatif rendah. Adapun kelompok pangan lain yang memiliki pangsa pengeluaran tinggi adalah kelompok makanan dan minuman jadi serta kelompok tembakau dan sirih. Kelompok pangan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah jika terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga adalah kelompok daging-dagingan dan buah-buahan.

Permintaan hampir semua komoditas pangan yang diteliti tidak responsif terhadap perubahan harganya sendiri (inelastis harga), kecuali pada komoditas terigu, daging sapi, dan rokok kretek filter. Permintaan komoditas pangan juga tidak responsif terhadap perubahan pengeluaran

rumah tangga (inelastis pengeluaran), kecuali pada rokok kretek filter.

Saran

Rumah tangga di perdesaan dengan golongan pendapatan per kapita antara Rp100.000 hingga Rp749.999 dan di perkotaan antara Rp100.000 hingga Rp499.999 merupakan rumah tangga yang sensitif terhadap kenaikan harga pangan (Tabel 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa golongan rumah tangga tersebut merupakan golongan yang paling pantas untuk mendapatkan program bantuan pangan. Program bantuan pangan ini salah satunya berupa raskin atau program pemerintah sejenisnya (e-warung, voucher, dsb). Program ini mengharuskan pemerintah memiliki *database* masyarakat yang kuat dan lengkap sehingga program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.

Adanya jangka waktu antara produksi dan waktu panen dalam produksi hasil pertanian menyebabkan fluktuasi ketersediaan dan harga pangan di pasar. Pemerintah dapat mengacu pada informasi mengenai hubungan antar-komoditas (substitusi/komplementer) dengan membuat pemetaan daerah, waktu (tren), dan potensi produksi komoditas pangan untuk memfasilitasi produksi pangan atau mengeluarkan stok atas barang substitusi jika pasar mengalami kelangkaan atas barang pangan tertentu. Hasil dari pemetaan tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat instruksi produksi (penanaman dan penernakan) dari penyuluh atau pemerintah daerah setempat.

Rokok merupakan komoditas pangan yang berdampak buruk pada kesehatan sehingga akan memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan perekonomian. Permintaan terhadap rokok bersifat elastis, baik terhadap harga sendiri maupun terhadap pengeluaran rumah tangga, sehingga kebijakan yang tepat untuk mengurangi permintaan terhadap rokok dapat berupa peningkatan cukai rokok dan kewajiban sejenis asuransi kesehatan dengan premi tinggi, contoh BPJS kelas I.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Tiyas Ambarsari dari Badan Pusat Statistik yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan angkatan 2014 dan bagian Sekretariat Program Studi Ilmu Ekonomi

Pertanian atas bantuan, diskusi, dan dukungannya selama pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri C, Luca L, Kevorchian C. 2015. Subsistence economy and food security – the case of rural households from Romania. *Procedia Economics and Finance*. 22(1):672-680.
- Ariani M, Purwantini TB. 2006. Analisis konsumsi pangan rumah tangga pascakrisis ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *SOCA*. 6(1):1-16.
- Asikin M, Risyanto, Said A. 2009. Manfaat program bantuan langsung tunai terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin: studi kasus di Kabupaten Karangasem dan Buleleng, Provinsi Bali. *Paper Penelitian*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2015. Data statistik ketahanan pangan tahun 2014. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku 3, Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, berdasarkan hasil Susenas September 2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016a. Statistik Indonesia 2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016b. Database Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran tahun 2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Cahyaningsih R. 2008. Analisis pola konsumsi pangan di Provinsi Jawa Barat [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Deaton A, Muellbauer J. 1980. An almost ideal demand system. *Am Econ Rev*. 70(3):312-326.
- [EIU] The Economist Intelligence Unit. 2015. Global food security index 2015 [Internet]. London (UK): The Economist Intelligence Unit; [diunduh 2015 Okt 16]. Tersedia dari: <http://foodsecurityindex.eiu.com/>.
- [IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2014. Global hunger index 2014: the challenge of hidden hunger. Washington, DC (US): International Food Policy Research Institute.
- Jayati LD, Madanijah S, Khomsan A. 2014. Pola konsumsi pangan, kebiasaan makan, dan densitas gizi pada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat. *J Penelitian Gizi dan Makanan*. 37(1):33-42.
- Kosen S. 2008. Dampak kesehatan dan ekonomi perilaku merokok di Indonesia. *Bul Penelitian Sistem Kesehatan*. 11(3): 207-211.
- Matz JA, Kalkuhl M, Abegaz GA. 2015. The short-term impact of price shocks on food security – evidence from urban and rural Ethiopia. *Food*

- Security. 7(3): 657-679. doi: 10.1007/s12571-015-0467-4.
- Mauludyani AVR, Martianto D, Baliwati YF. 2008. Pola konsumsi dan permintaan pangan pokok berdasarkan analisis data Susenas 2005. *J Gizi Pangan*. 3(2):101-117.
- Miranti A. 2016. Pengaruh pendapatan dan harga pangan terhadap tingkat diversifikasi pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat [Tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Ogundari K. 2013. Determinants of food-poverty states and the demand for dietary diversity in Nigeria. Paper No. 161302. 2013 AAAE Fourth International Conference; 2013 Sep 22-25; Hammamet, Tunisia. Tunisia (MA): African Association of Agricultural Economists.
- Purwaningsih Y, Hartono S, Masyhuri, Mulyo JH. 2010. Pola pengeluaran pangan rumah tangga menurut tingkat ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. *J. Ekonomi Pembangunan*. 11(2):236-253.
- Purwantini TB, Ariani M. 2008. Pola pengeluaran dan konsumsi pangan pada rumah tangga petani padi. Dalam: Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Pertanian; 2008 Nov 19; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. hlm.1-16.
- Putranto K, Taofik A. 2014. Pola diversifikasi konsumsi pangan masyarakat adat Kampung Cirende, Kota Cimahi Jawa Barat. *J ISTEK*. 8(1):159-181.
- Rachman HPS, Ariani M. 2008. Penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia: permasalahan dan implikasi untuk kebijakan dan program. *AKP*. 6(2):140-154.
- Ruel MT. 2003. Operationalizing dietary diversity: a review of measurement issues and research priorities. *J Nutr*. 133(11):3911-3926.
- Sitepu RK, Sinaga BM. 2006. Aplikasi model ekonometrika: estimasi, simulasi, dan peramalan menggunakan program SAS. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Taruvinga A, Muchenje V, Mushunje A. 2013. Determinants of rural household dietary diversity: the case of Amatole and Nyandeni Districts, South Africa. *Int J Dev Sustain*. 2(4):1-15.
- Thiele S, Weiss C. 2003. Consumer demand for food diversity: evidence for Germany. *Food Policy* 28(2):99-115. doi: 10.1016/S0306-9192(02)00068-4.
- Torlesse H, Kiess L, Bloem MW. 2003. Association of household rice expenditure with child nutritional status indicates a role for macroeconomic food policy in combating malnutrition. *J Nutr*. 133(5):1320-1325.
- Wiranthi PE, Suwarsinah HK, Adhi AK. 2014. Determinants of household food security: a comparative analysis of Eastern and Western Indonesia. *J Agric Sci*. 15(1):17-28.